

MODEL PENGEMBANGAN PELAYANAN ORGANISASI SOSIAL LOKAL (OSL) BERBASIS MASYARAKAT

Dasuki

ABSTRAK

Peranan pelayanan organisasi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga organisasi sosial lokal sebagai kegiatan dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya masalah-masalah sosial, termasuk meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilingkungannya.

Model pelayanan sosial ini merupakan refleksi program kegiatan masyarakat dalam mengakses pemberdayaan penduduk lokal dengan meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, sistem jaringan keperangkatan, dengan pelayanan sosial mendorong pengarusutamaan manajemen jaringan berbasis lokalitas. Dan model pelayanan sosialnya merupakan proses atau cara pendekatan dalam penanganan pelayanan sosial terhadap anggota masyarakat sebagai salah satu dari suatu sistem, penguatan struktur dan fungsi masyarakat lokal sebagai pranata sosial.

Untuk penajaman perspektif partisipasi masyarakat ke depan, dengan strategi merujuk kepada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada pada Organisasi Sosial Lokal (OSL) sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Dengan mengembangkan konsep berpikir global bertindak lokal, maka ada keharusan bagi otoritas lokal memberikan prioritas perhatian berpartisipasi dalam model pengembangan pelayanan OSL sebagai WKSBM, agar dapat menumbuhkan kegiatan pembangunan dari arus bawah, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga mampu menangkal masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kesulitan lapangan kerja sekaligus sebagai sumber modal bersama dalam meningkatkan ketahanan sosial, mental kerohanian keagamaan bagi anggotanya. Organisasi sosial tersebut di tingkat lokal masyarakat desa maupun di kelurahan kota, dirasakan peranannya sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sosial kemasyarakatan dilingkungannya.

Kata kunci : Organisasi Sosial Lokal (OSL), Pelayanan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan kelompok-kelompok masyarakat merupakan investasi sosial pembangunan yang bertujuan mensejahterakan anggotanya termasuk dengan pelayanan-pelayanan sosial lainnya, dimana permasalahan kesejahteraan sosial yang dialaminya dapat dipecahkan atau dikendalikan melalui kegiatan-kegiatan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik secara individu, keluarga/kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kata lain keberadaan Kelompok Pranata Sosial (KPS) itu dibutuhkan oleh mereka dan dibangun untuk mereka, dan kegiatan mereka dapat bergulir pelaksanaannya melalui kebersamaan kelompok sosial secara informal, bahkan diantaranya ada yang dapat

berkembang maju menjadi organisasi formal (melembaga).

Model pelayanan sosial melalui OSL merupakan refleksi program kegiatan masyarakat dalam mengakses pemberdayaan penduduk lokal dengan meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, sistem jaringan keperangkatan pelayanan sosial dengan mendorong pengarusutamaan manajemen jaringan berbasis lokalitas. Dan modal pelayanan sosialnya merupakan proses atau cara pendekatan dalam penanganan pelayanan sosial sebagai suatu pranata sosial dari sistem, penguatan struktur dan fungsi masyarakatnya.

Seiring perkembangan zaman maka bentuk dan formulasi pola-pola OSL terdiri dari Kelompok Pranata Sosial (KPS) berujud sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM), adakalanya bentukan OSL tersebut didukung dan dikembangkan oleh pemerintah dari motivasi aparat setempat dan sebaliknya pemerintah tidak terlibat langsung.

Di dalam perkembangan selanjutnya tidak semua OSL sebagai WKSBM dapat berkembang dengan sempurna baik, oleh karena itu dibutuhkan penguatan dengan pemberdayaan melalui kegiatan pendidikan dan latihan kesejahteraan sosial, maupun advokasi untuk mengatasi kebutuhan objektif masyarakat.

Berapa banyak perkumpulan organisasi sosial masyarakat yang telah tumbuh secara alamiah bahkan terstruktur, yang merupakan investasi sosial, mempunyai tujuan membangun pelayanan sosial berbasis masyarakat, dengan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan melalui kelompok-kelompok OSL.

Ternyata hasil kegiatan penelitian pada beberapa lokasi sasaran, menunjukkan manfaat hasil yang patut mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut, agar dapat dikembangkan pada daerah lain dalam lingkungannya sendiri.

Berpijak dari uraian tersebut, saya coba menganalisa dan memproyeksikan dalam kaitan perkembangan otonomi daerah yang telah membawa perubahan dan pertumbuhan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia. Untuk kedepan penajaman perspektif secara strategik merujuk kepada pemberdayaan SDM yang berada pada OSL dengan pendekatan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, guna menjadikan kegiatan mereka proporsional sebagai titik tolak dalam melakukan pengembangan masyarakat (*community development*).

Komitmen global dan regional memberikan perhatian secara proporsional dan profesional dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia, diawali dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Copenhagen 11 tahun lalu (Tahun 1995), dan komitmen nasional terhadap upaya memberikan perhatian kepada individu, keluarga dan komunitas masyarakat utamanya bagi mereka yang berada dalam kondisi lemah (rentan) dan tidak mampu. Dan disadari pula telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu dengan memberikan

peran kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan, yang diikuti dengan komitmen politik melalui penerapan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dengan meletakkan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada daerah Kabupaten/Kota.

Saya berharap bahwa perspektif pengalaman empiris yang saya paparkan dalam karya tulis ini, setidaknya dapat menjadi bahan renungan bagi mereka yang peduli (termasuk para perancang, pembuat kebijakan, eksekutif pengambil keputusan, legislatif, yudikatif dan pihak-pihak terkait), pada proses pembelajaran yang dapat menambah hal-hal positif, dengan mengurangi/menghilangkan kekeliruan yang ada sembari melengkapi pembelajaran yang mengakar pada masyarakat dalam kaitan warisan nilai budaya untuk menetapkan masa depan yang cerah bagi generasi kita mendatang.

Program-program teknis dan fungsional Departemen Sosial dimaksud untuk menumbuhkan dan memantapkan kompetensi dan integritas SDM Kesejahteraan Sosial, yang diarahkan berpusat pada manusia (*the centered people development*), dengan mengembangkan konsep berpikir global bertindak lokal, maka ada keharusan bagi otoritas lokal melalui Pemerintah daerah memberikan prioritas perhatian berpartisipasi dalam pengembangan OSL, guna menumbuhkan kegiatan pembangunan dari arus bawah, oleh dan untuk masyarakat.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan hal-hal demikian, dalam upaya peningkatan peran, posisi dan kontribusi pembangunan kesejahteraan sosial ke depan, dengan meletakkan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang merupakan salah satu faktor penentu/determinan, dan seharusnya memperoleh perhatian sebagai langkah nyata untuk program-program seperti; pendidikan dan pelatihan bagi institusi pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Bagaimana keberadaan SDM pada OSL maupun dalam wadah WKSBM, dapatkah kelembagaan

tersebut memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan program yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara proporsional dan profesional tanpa dukungan pemerintah?

Atas dasar pokok permasalahan tersebut diatas ada tiga hal yang menjadi perhatian penulis sebagai berikut:

1. Pelayanan sosial dengan pola yang sangat sederhana dan alami sampai pada perkembangan administrasi yang baik dan resmi. Usaha pelayanan kesejahteraan sosial tersebut pada umumnya dilaksanakan berdasarkan sistem *Community Base Organisation (CBO)* yang ditujukan pada individu, keluarga maupun kelompok kemudian dikelola oleh warga masyarakatnya sendiri.
2. Keberadaan OSL merupakan potensi sekaligus media dan alat masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan ditingkat komunitasnya, atas dasar wilayah pada administrasi kewilayahan lokal seperti RT, RW, desa, kampung, kelurahan, nagari, jorong dan sejenisnya.
3. Disadari bahwa masih banyak OSL sebagai WKSMB ditinjau dari kualitas, kuantitas, dan sebaran sumber daya manusia kesejahteraan sosial belum memadai, maka diperlukan pengembangan peningkatan pemberdayaan, integritas, manajemen melalui pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, bahwa perannya sangat potensial dalam pembangunan masyarakat lokal.

C. Definisi Operasional

Pengertian pranata sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2001), adalah sistim tingkah laku sosial yang bersifat resmi, serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dengan seluruh perlengkapan guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat, Sedangkan pengertian WKSMB menurut kebijakan operasional Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat (2006), adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu pengertian dalam penelitian ini yang berkaitan dengan organisasi manusia yang tumbuh dan berkembang atas keperangkatan pelayanan sosial maupun usaha kelompok bersama yang disebut dengan OSL.

II. METODE PENELITIAN

Metode kajian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran sejauh mana hasil yang dicapai dari keberadaan kelembagaan akar rumput sebagai suatu peran pelayanan sosial yang berbasis masyarakat. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kelurahan/Desa dan yang dijadikan sumber informasi, atau responden yang diwawancarai adalah semua komponen yang terlibat langsung dalam keberadaan dan kegiatan kelembagaan akar rumput, antara lain terhadap pengurus maupun anggota organisasi, atau perkumpulan keagamaan, atau pendamping/pembina/tokoh masyarakat maupun lurah yang disebut "*key informan*".

Dalam pengumpulan data, tehnik yang digunakan disamping wawancara juga observasi serta dokumentasi yang ditujukan untuk mengumpulkan data penunjang yang dapat mendukung data yang telah ada. Dengan analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerjanya dengan objek :

1. Lokasi penelitian sebagai berikut; (1.) Jakarta di kelurahan Klender, Malaka Jaya Jakarta timur pada perkumpulan Majelis Taklim Assholihat dan Kelurahan Pondok Pinang pada WKSMB 'Peguyuban PKK Nurul Hikmah Kebayoran Lama' Jakarta Selatan, (2) Jogjakarta kelurahan RW 08 Surosutan pada salah satu WKSMB "Warga Rukun" Jalan Sidokabul Jogjakarta, (3) Bandung didesa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung pada kelompok sosial warga desa Cibodas dalam pelaksanaan program raksa desa.
2. Pendekatan analisa kualitatif, atas dasar pengamatan saya terhadap suatu kesatuan jaringan-jaringan sosial atau suatu sistem sosial yang hidup adalah jaringan-jaringan komunikasi yang membentuk dirinya sendiri. Artinya apa?

yaitu suatu organisasi manusia hanya akan menjadi suatu sistem hidup bila organisasi tersebut tersusun dalam jaringan atau mengandung jaringan-jaringan yang lebih kecil dalam ruang lingkungannya. Jaringan-jaringan komunikasi mempunyai efek ganda yaitu menghasilkan gagasan dan konteks makna, serta menghasilkan sistem nilai, kepercayaan, aturan-aturan perilaku yang terintegrasi menjadi struktur sosial dengan kata lain terbentuknya OSL.

III. PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Gambaran OSL

Gambaran pokok yang menjadi sasaran penelitian adalah organisasi manusia, manajemen dengan tipe kelembagaan yang bagaimana secara mendasar meletakkan pengorganisasian masyarakat sebagai aktor yang tepat pada masyarakat akar rumput, dan berada di desa ataupun dikelurahan kota metropolitan, mampu beradaptasi secara berkelanjutan di abad yang penuh kompetitif, cepat berubah, penuh dengan ketidakpastian, harus bergerak cepat, dimana tipisnya batas-batas dalam era mendunia.

Revolusi teknologi informasi di abad sekarang ini telah melahirkan suatu fenomena sosial baru, yang tersusun dikelilingi aliran informasi, sistem jaringan telah menjadi suatu bentuk organisasi manusia dan menciptakan istilah "masyarakat jaringan" (*network society*) untuk mendeskripsikan dan menganalisa struktur sosialnya sendiri.

B. Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian mempunyai tujuan yang berkaitan dengan pengembangan OSL sebagai WKSBM, dalam kajian ini telah menelusuri beberapa KPS yang tumbuh dan berkembang dalam kegiatan dikalangan masyarakatnya sendiri, bertujuan mewujudkan:

1. Pemahaman tentang kondisi objektif masyarakat dilingkungannya
2. Partisipasi masyarakat terhadap penanganan PMKS
3. Perencanaan dan Pemberdayaan masyarakat lokal
4. Membangun jalur komunikasi antar warga atau kelompok masyarakat dan pemerintah daerah setempat

Lahirnya konsep proses pelayanan sosial oleh dan berbasis masyarakat pada umumnya merupakan penguatan ikatan warga masyarakat sebagai suatu sistem, penguatan struktur dan fungsi masyarakat, pengembangan pelayanan sosial dalam konteks mengatasi dampak sosial; dan pengembangan komunikasi antar warga masyarakat, serta pemberdayaan dalam usaha ekonomis produktif masyarakat lokal dan manajemen organisasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diarahkan pada manfaat penelitian apakah OSL sebagai wahana partisipasi warga, keberadaannya memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam pembangunan masyarakat setempat, maka peranan kelembagaan dengan wujudnya melalui KPS dan dari persatuan-persatuan, keagamaan, paguyuban, arisan, perserikatan sosial dan lain-lain, yang tumbuh dan berkembang diseluruh lapisan masyarakat, perlu dipertimbangkan sebagai instrumen dan strategi dalam pelayanan sosial dilingkungannya, serta sebagai investasi sosial masyarakat, maka atas pertimbangan demikian penelitian ini bermanfaat untuk;

1. Pengkajian yang berupaya mendeskripsikan profil karakter kelembagaan meliputi aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerja dengan semua peranannya membangun warga masyarakat.
2. Untuk mengetahui sampai berapa jauh hasil penelitian menunjukkan bukti keberadaan kelembagaan akar rumput, dapat menumbuhkan keberdayaan dalam meningkatkan kesetiakawanan sosial, dan kegotongroyongan.
3. Meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan warga dilingkungannya dengan membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan sejenisnya termasuk penanganan dan pengentasan PMKS.

D. Kerangka Pemikiran

Landasan kajian konseptual ditujukan pada keberadaan kelembagaan organisasi lokal yang dibangun dan dikembangkan melalui pertemuan dan musyawarah oleh warga masyarakat setempat.

Etienne Wenger seorang pakar teori organisasi menyebut komunitas praktis (*commu-*

nities of practice) dalam jaringan sosial yang membentuk dirinya. Bahwa seluruh jaringan sosial membentuk dirinya sendiri, menghasilkan konteks makna bersama, pengetahuan bersama, aturan perilaku, batasan, dan identitas kolektif anggotanya bagi jaringan sosial yang membentuk dirinya sendiri.

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem mekanisme pem-

Kesos minimal dengan pengetahuan dasar pekerjaan sosial yang menekankan pada hak-hak asasi manusia, pemberdayaan organisasi, proses pemberdayaan serta otonomi daerah sehingga menumbuhkan penguatan organisasi sosial lokal akibatnya yang pada akhirnya akan mewujudkan keberdayaan masyarakat melalui bentukan OSL oleh, untuk dan dari masyarakat sendiri. Secara ringkas digambarkan alur pikir sebagai berikut:

Faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat

- Globalisasi
- Perubahan paradigma sistem otonomi daerah
- Perkembangan nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
- Pengaruh revolusi teknologi informatika dan mess media



Tumbuhnya OSL sebagai WKSBM memiliki profil dan karakter

- Bentuk OSL
- Keanggotaan OSL
- Mekanisme kegiatan OSL
- Jenis Pelayanan OSL
- Dampak keberadaan OSL
- Manfaat Pelayanan OSL
- Manfaat OSL bagi pembangunan
- Peran pelayanan OSL



Pengembangan dan Penguatan OSL

- Peningkatan SDM melalui :
- Diklat Kesejahteraan Sosial
- Pelayanan hak azasi manusia
- Pemberdayaan
- Proses pemberdayaan
- Otonomi daerah



Indikator hasil yang akan dicapai

Semakin banyak bentukan OSL sebagai WKSBM akan mengurangi beban warga masyarakatnya



Hasil yang diharapkan

Terwujudnya keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosialnya dari, dan untuk, oleh OSL sebagai WKSBM

berdayaan masyarakat, yang memiliki posisi strategis dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya tanpa turut campur pemerintah, dan pemerintah hanya merupakan fasilitator dari keberadaan dan pengembangannya, oleh karena itu maka perlu meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, dengan sistim jaringan keperangkatkan yang sudah ada dimasyarakat.

Untuk kajian stratejik dalam pembangunan masyarakat lokal diperlukan peningkatan SDM yang berada pada OSL, dengan pengembangan OSL melalui Diklat

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian berupa profil dan karakter kelompok pranata sosial ditinjau dari sudut sebagai berikut, (1) bentuk, (2) keanggotaan, (3) mekanisme kegiatan, (4) jenis pelayanan, (5) dampak keberadaan OSL, (6) manfaat pelayanan OSL, (7) manfaat OSL bagi pembangunan, (8) pengembangan pelayanan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Bentuk OSL sebagai WKSBM.** Pembentukan kelompok organisasi sosial tumbuh berkembang melalui dua cara, yaitu: Pertama, berdiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat sebagai KPS, seperti perkumpulan pengajian, keagamaan, ikatan keluarga, ikatan kesukuan dan marga, kelompok arisan, kelompok kesenian, majelis taklim dan olah raga serta adat, dimana kelompok ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya lokal. Kedua, pembentukannya diprakarsai oleh pemerintah (Contohnya model pelayanan sosial sebagai WKSBM merupakan refleksi program Departemen Sosial RI melalui Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi/ Dinas Sosial Propinsi) setempat, yang merupakan kepanjangan tangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat lokal, dimana pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka berdaya dalam mengatasi PMKS dilingkungannya.

2. **Keanggotaan OSL sebagai WKSBM.** Keanggotaan didasari atas kesepakatan dari hasil pemilihan anggotanya berdasarkan kepentingan atau tanpa mendasari pada pendidikan tertentu, keterampilan, persamaan agama, keturunan, persamaan suku, persamaan pekerjaan, yang penting memiliki kepedulian sosial, persamaan kepentingan pada domisili diwilayahnya (RT/RW/Desa/Kelurahan). Keanggotaan pada umumnya bersifat sukarela, mempunyai hubungan interpersonal dan biasanya ada yang memiliki ikatan kekeluargaan namun sebagian besar atas kebutuhan kelompok.

Kesepakatan tertulis biasanya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hak dan kewajiban anggota memiliki banyak persamaan antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, mengikuti pengajian, memperoleh arisan, memperoleh bantuan sosial dan mengikuti setiap kegiatan perkumpulan. Sedangkan kewajiban anggota antara lain menghadiri pertemuan rutin, iuran wajib, iuran sukarela, mengikuti arisan wajib dan keharusan mengikuti kegiatan perkumpulan secara aktif.

3. **Mekanisme Kegiatan OSL sebagai WKSBM.** Pada umumnya mekanisme wilayah kegiatan berada pada tingkat RT, RW, atau desa/kelurahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik dalam pembentukan awal pendirian organisasi yang didasarkan pada tujuan memberikan pelayanan sosial dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakatnya, mereka dapat disinergikan untuk kepentingan sebuah program yang luas dan dampaknya dapat menjangkau banyak orang sesuai dengan potensi yang dimiliki dari organisasi lokal tersebut.
4. **Jenis Pelayanan Sosial OSL sebagai WKSBM.** Lurah adalah tokoh formal yang mengetahui kondisi warganya maka penempatan kepengurusan organisasi lokal dari peran serta lurah turut memfasilitasi, sehingga telah membangkitkan gerakan masyarakat sipil diwilayahnya melalui keberadaan organisasi lokal tersebut sebagai pelayanan sosial anggotanya juga merupakan forum komunitas sarana konsolidasi internal antar komunitas, menjadi wadah penyampaian keluhan kesah warga, sekaligus menjadi katup pengaman sosial mencegah konflik sosial antar warga masyarakat, secara individu maupun kelembagaan, sehingga organisasi lokal secara tidak langsung juga terlibat dalam proses pemerintahan lokal yang turut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Dalam proses pembangunan, OSL mampu membangun hubungan jaringan sosial di antara kelompok yang memiliki berbagai perbedaan kepentingan sebagai Forum Komunitas, juga mampu membangun kesetaraan antara kelompok-kelompok yang ada tersebut, aksesibilitas bagi mereka yang lemah seperti kelompok miskin, penyandang cacat dan lain-lain, terutama mereka yang selama ini termarginalkan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, pengurus mengadakan pertemuan untuk jenis pelayanan sosial mereka tingkatkan dengan melakukan identifikasi dan menginventarisasi permasalahan sosial yang ada di tingkat kelurahan yang ditujukan pada rehabilitasi sosial

masyarakat seperti : 1) Anak putus sekolah, 2) Lansia miskin, 3) Korban kekerasan, 4) Anak terlantar, 5) Keluarga miskin, 6) Korban narkoba, HIV/Aids, 7) Keluarga bermasalah, 8) Keluarga cacat. 9) Rentan jalan (Anjal), 10) Kenakalan anak dan lain-lain.

5. Dampak keberadaan OSL sebagai WKSBM. Keberadaan OSL dapat ditinjau dari sudut, a) bagi anggota, b) bagi warga masyarakat, dan c) bagi pemerintah lokal sebagai berikut:

a) Bagi Anggota Organisasi

Kegiatan pelayanan sosial membawa dampak positif bagi anggota warga masyarakat lokal dalam upaya membantu mengatasi berbagai persoalan maupun kebutuhan hidup mereka. Upaya OSL berupa penanganan dan pengentasan masalah sosial sebagai akibat dari dampak meningkatnya kemiskinan serta pemberdayaan warga masyarakat dalam usaha ekonomi produktif dengan usaha bersama kegiatan kelompok ataupun bentuk kegiatan KUBE. Dampak sosial psikologis keberadaan organisasi lokal adalah meningkatkan munculnya semangat kebersamaan dan kegotongroyongan sesama anggotanya ditunjukkan melalui upaya pengentasan kemiskinan warga dan kepedulian terhadap masalah sosial lain seperti bantuan terhadap anak yatim, bantuan fakir miskin dan bantuan bagi orang jompo dan lain-lain.

b) Bagi Masyarakat disekitarnya

Keberadaan OSL berpengaruh pada kehidupan masyarakat disekitarnya, karena mampu menghidupkan kembali rasa kebersamaan kolektifitas, kepedulian dan kerjasama gotong royong dikalangannya. Bantuan terhadap keluarga miskin, jompo terlantar maupun untuk kegiatan simpan pinjam mempunyai kemampuan jangkauan pelayanan yang besar, dapat memberikan bantuan anggotanya bahkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kepedulian warga masyarakat disekitarnya .

c) Bagi otonomi Pemerintah setempat

OSL sebagai WKSBM merupakan Forum Komunitas warga sehingga dapat melaksanakan fungsi fasilitasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, yang mana fungsi-fungsi tersebut tidak lagi diperankan oleh pemerintah lokal terutama di dalam pengambilan keputusan maupun kemampuan untuk mengakses sumber daya dan dana serta informasi.

Di dalam OSL ini, dikembangkan metode dan teknik penguatan masyarakat, melalui pertemuan terbuka semua warga mengemukakan pemikirannya tentang isu strategis permasalahan sosial yang dihadapi untuk diatasi, sehingga beban dan tanggungjawab sosial dapat diatasi oleh dan untuk warga masyarakat sendiri.

6. Manfaat peran pelayanan OSL sebagai WKSBM. Peranan OSL di bidang pelayanan sosial memberikan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Manfaat bagi pemerintah tingkat desa/kelurahan yang ditinjau dari aspek; ekonomis, sosial psikologis, sosial budaya dan sosial politik sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomis, keberadaan organisasi lokal mampu meningkatkan dan menciptakan pemberdayaan secara ekonomis bagi anggota maupun masyarakat dilingkungannya serta mampu menangani pengentasan PMKS dan penyantunan program ekonomis produksi.

b) Manfaat sosial psikologis, peranan OSL mampu menciptakan suasana kebersamaan dan secara psikologis mampu meningkatkan rasa kegotong royongan dalam mendukung kapasitas pembangunan, dapat mewujudkan kapasitas percaya diri yang dimiliki potensi kekuatan, adanya kesadaran kolektif dapat menumbuhkan investasi sosial kelompoknya.

- c) Manfaat sosial budaya, peranan OSL mampu membangkitkan kembali nilai-nilai sosial budaya yang masih berakar dalam jiwa masyarakat, menghambat pengaruh nilai-nilai perubahan dari luar yang merusak, serta mampu menseleksi secara proporsional berdasarkan pola interaksi yang menggambarkan persepsi penanganan masalah sosial berdasarkan nilai budaya lokal.
- d) Manfaat sosial politik, peranan OSL tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan aspek politik, tanpa mengurangi peran pemerintah lokal, Forum Komunitas WKSMB, mampu membangun kesetaraan antara kelompok-kelompok, dan dapat memberikan aksesibilitas bagi mereka yang lemah seperti kelompok miskin, penyandang cacat, jompo terlantar dan lain-lain.
- a) Tersedianya informasi permasalahan dan kebutuhan warga masyarakat oleh organisasi lokal.
- b) Tersedianya data tentang PMKS oleh organisasi sosial lokal.
- c) Organisasi sosial lokal sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi pembangunan desa/kelurahan.
- d) Mendorong dan mempercepat target pemberdayaan pembangunan masyarakat lokal
- e) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan warga masyarakat lokal di bidang kesejahteraan sosial
- f) Mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dilingkungannya
- g) Mengentaskan penanganan permasalahan sosial PMKS lokal.

7. **Manfaat OSL sebagai WKSMB bagi Pembangunan.** Kontribusi OSL dalam pembangunan masyarakat, dapat dijumpai dalam hal yang sangat mendasar, pada kegiatan pembangunan wilayah lokal berupa :

8. **Pengembangan pelayanan OSL sebagai WKSMB.** Hasil wawancara penulis dengan beberapa ketua OSL dalam pengembangan pelayanannya diperoleh kejelasan strategi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, dengan merumuskan langkah bagan kegiatan sebagai berikut:

MASUKAN	PROSES	KELUARAN	DAMPAK	HASIL
Modal sosial 1. Kebersamaan 2. Komitmen 3. Sistim nilai 4. KPS 5. Jaringan kerja Kearifan sosial 1. Kebijakan lokal 2. Nilai budaya 3. Iptek lokal 4. Sumber daya dan dana 5. Mekanisme kerja lokal Inisiator 1. Pengurus 2. Dukungan pemuka masyarakat lokal 3. Inst.pemda dan LSM/dunia usaha dan lain-lain	Mekanisme sosial lokal 1. Pertemuan rutin dan musyawarah 2. Identifikasi masalah sosial 3. Melibatkan semua anggota 4. Melibatkan KPS-KPS 5. Prioritas pengentasan masalah Transparansi kegiatan 1. Keterpaduan program kegiatan 2. Kejegan laporan kegiatan 3. Koordinasi sinergi 4. Tertib administrasi dan keuangan	1. Peningkatan perkembangan WKSMB 2. Terstruktur mekanisme kerja sosial 3. Melembaganya sistem jaringan manajemen lokal 4. Wadah pengkajian strategis kasus sosial 5. Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Berkurangnya masalah sosial 2. Melekatnya rasa solidaritas lokal 3. Terarah manfaat sumber daya dan dana masyarakat lokal 4. Membantu pemerintah dalam UKS 5. Terhindarnya konflik sosial	1. Meningkatnya solidaritas sosial 2. Meningkatnya kesadaran kolektif 3. Meningkatnya kegotong-royong persaudaraan 4. Mempererat nilai-nilai sosial budaya dan kemanusiaan 5. Terentasnya masalah sosial lokal

Dari pembahasan bagan kegiatan tersebut dapat kami sajikan analisa pelaksanaannya sebagai aspek masukan dalam alur jaringan kegiatan berupa pengarusutamaan manajemen jejaring kerja organisasi lokal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi berbagai sumber yang dapat dijadikan relasi organisasi lokal bagi mereka.
 - b. Penyusunan dan perumusan berbagai gagasan maupun program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan warganya, maksudnya kegiatan diperkirakan bisa menjadi alat tawar dan diterima oleh pemilik sumber.
 - c. Menginventarisasi dan memetakan pihak-pihak potensial yang memiliki sumber daya dan dana maupun mendukung program kegiatan organisasi lokal.
 - d. Penataan dalam penginstitutionan organisasi lokal terwujud melalui sistem mekanisme sosial alamiah dengan uraian menggambarkan rincian tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat, tetapi terpadu dalam gerak satu tim koordinasi.
 - e. Rumusan program kegiatan merupakan produk kesepakatan dalam musyawarah pengurus dan anggota yang dilaksanakan secara terarah, terencana dan berkelanjutan di bawah tanggung jawab satuan koordinasi (manajemen jaringan berbasis lokal).
 - f. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang dilakukan sesuai dengan intensitas kebutuhan.
9. Pengembangan SDM OSL melalui program Pendidikan Dasar Pekerja Sosial (PDPS). Dampak Globalisasi membawa pergeseran paradigma terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hidup manusia serta isu-isu strategis, yang memicu perubahan konstilasi komitmen politik pemerintah, baik bersifat nasional dan lokal telah mendorong untuk memberikan peran kepada masyarakat

sebagai pelaku utama dalam kegiatan pembangunan

Departemen Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang baru, berupaya melakukan pemberdayaan sosial pada sumber dan potensi sosial masyarakat sebagai pelaksana pelayanan langsung.

Oleh karena itu untuk sasaran pengembangan OSL ditujukan pada pelaksanaan :

1. *Pelayanan yang menekankan kepada pendekatan Hak Asasi Manusia.*

Pelayanan sosial ini diberikan oleh pemerintah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) yang berorientasi pada masalah (*problem*) melalui pendekatan selektivitas. Ke depan pelayanan ini diarahkan pada pelayanan sosial universal artinya bahwa perlindungan sosial harus diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya serta pemecahan permasalahannya. Sesuai dengan UUD 1945 sebagai suatu tanggung jawab pemerintah terhadap warganya.

2. *Peranan sebagai pencipta peran baru (role making) dalam pengembangan pembangunan kesejahteraan*

Ke depan kecerdasan profesional dapat menangkap "*role expectation*" yang berkembang di masyarakat. Departemen Sosial sebagai lembaga profesional mampu memberikan "*argumen profesional*" dapat mencerdaskan bangsa (termasuk pemerintah dan legislator), sehingga tidak hanya cukup melakukan "*role playing*" dan juga tidak hanya "*role taking*" dengan suatu kepatuhan yang tidak kreatif, tetapi mampu melakukan "*role making*" untuk mengembangkan secara kreatif dan cerdas peran-peran, yang dapat mengatasi menjawab masalah yang sifatnya lebih mendasar, berskala nasional sehingga menjadi "*agent of change*" dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

3. *Pelayanan pengembangan (developmental services) bagi masyarakat.*

Pelayanan sosial residual bersifat kuratif-rehabilitatif, yang ditujukan kepada orang-orang yang bermasalah, bilamana lembaga-lembaga seperti keluarga, ekonomi, pendidikan, struktur politik, KPS merupakan OSL yang ada tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka guna memenuhi kebutuhan masyarakat pelayanan sosial bergeser ke arah pengembangan (*developmental*), bertujuan untuk menggali dan menumbuhkan berbagai sumber potensi atau modal sosial yang dimiliki oleh kepranataan sosial masyarakat, baik yang bersifat individual, kelompok maupun juga bersifat sosial yang berperan sebagai fungsi pengembangan dan pemberdayaan juga berperan sebagai fungsi pencegahan.

4. *Penanganan Pendekatan desentralistik (bottom up).*

Bergulirnya otonomi daerah Instansi sosial, baik Pusat maupun daerah harus menerapkan pendekatan desentralistik (*bottom up*) yang bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, sumber-sumber dan potensi serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Maka dalam hal ini perlu dikembangkan suatu jaringan kerjasama dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat merumuskan suatu pelayanan sosial yang berorientasi pada kebutuhan, sumber dan potensi masyarakat lokal.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun OSL sebagai WKSMB sebagai suatu model pelayanan sosial berbasis masyarakat dilingkungannya, yaitu dengan melakukan pemberdayaan

penduduk lokal, melalui cara meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, dan sistem jaringan keperangkatkan pelayanan sosial dengan mendorong pengarusutamaan manajemen jaringan berbasis lokalitas.

2. OSL sebagai WKSMB yang maju, serta berhasil sangat potensial sebagai suatu strategi pengembangan model pelayanan sosial dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak sosial dari pengaruh globalisasi yang dapat merusak nilai-nilai/sendi budaya tradisional, adat sopan santun masyarakat maupun pengaruh yang dapat merusak moral bangsa disamping mampu juga menangani masalah sosial ekonomi, meningkatnya jumlah PMKS di wilayah lokal.
3. Adapun sasaran prioritas pengembangan model pelayanan sosial dalam mewujudkan pelayanan sosial profesional oleh masyarakat, terletak pada OSL sebagai WKSMB, sebagai suatu model pelayanan sosial masyarakat dilingkungannya, dan sebagai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

B. Rekomendasi

1. Diperlukan dukungan motivasi dan fasilitasi kepada OSL sebagai WKSMB baik diminta maupun tidak oleh masyarakat, bahwa otoritas lokal pemda (lurah/camat/bupati/walikota) dapat memberikan prioritas berpartisipasi dalam pengembangan program bagi organisasi warga masyarakat lokal.
2. Untuk menampilkan kinerja pembangunan kesejahteraan sosial kedepan, terkait dengan perubahan paradigma baru, yang dilandasi dengan kompetensi dan integritas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, maka perlu dilakukan langkah nyata untuk menumbuhkan dan membangun wawasan kesejahteraan sosial, mengembangkan perspektif kesejahteraan sosial serta pemberdayaan infrastruktur sosial (OSL sebagai WKSMB) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial lokal, diperlukan komitmen dan perhatian dalam program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

3. Untuk meningkatkan pengembangan SDM kesejahteraan sosial pada OSL bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal tersebut, dapat dilaksanakan kerjasama dengan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial di Jakarta maupun Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI yang ada pada daerah.
4. Untuk menangkal pengaruh terhadap meningkatnya jumlah PMKS secara nasional, disarankan kepada Pemda Propinsi melalui Badan Kesejahteraan Sosial/Dinas Sosial diseluruh Indonesia agar dapat menciptakan, mendorong serta menganggarkan dana, dan daya dalam pembentukan WKSBM lokal diseluruh wilayahnya sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasuki. 2005, *Program Raksa Desa Keluarga Miskin di Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung (Studi Kasus Pemberdayaan Keluarga Miskin bagi TKSM)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Dasuki. 2006, *Strategi Membangun Model Pelayanan Sosial Berbasis Masyarakat Melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Yogyakarta*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial RI. 1998, *Indikator Kesejahteraan Sosial dan Pengukurannya*. Badan Pelatihan Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial RI. 2004, *Keputusan Menteri Sosial RI. No.42/HUK/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Departemen Sosial RI. 2004, *Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Melalui Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2004-2010*, Jakarta: Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial.
- Departemen Sosial RI. 2005, *Produktifitas Jaringan Kerja Pranata Sosial Komunitas Model Pengembangan dan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat*, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Jakarta: Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial.
- Departemen Sosial RI. 2006, *Kebijakan Operasional Pemberdayaan Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat(WKSBM)*, Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. 2004. *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Pranarka, AMW dan Vindiyandika Moeljarto. 1984, *Pemberdayaan Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: CSIS.

BIODATA PENULIS :

Dasuki, Saat ini sebagai widyaiswara Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI; anggota pengurus PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) Pusat; pembina Yayasan Sosial Bhakti Assolihat Jakarta Timur; anggota pengurus IWI (Ikatan Widyaiswara Indonesia) Nasional; sekretaris IWI Cabang Depsos RI dan turut membantu DNIKS (Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial).